

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebijakan penutupan Lokalisasi Wanda merupakan kebijakan publik yang membawa konsekuensi luas terhadap kehidupan masyarakat. Penutupan ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif dalam penertiban prostitusi, melainkan sebagai perubahan sosial politik yang memengaruhi struktur kehidupan warga secara nyata. Fenomena pasca penutupan berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari perubahan sosial ekonomi masyarakat, perubahan ketenteraman lingkungan, hingga dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Dari dampak sosial penutupan Lokalisasi Wanda menimbulkan perubahan struktur sosial masyarakat sekitar, terutama bagi kelompok yang sebelumnya bergantung pada aktivitas lokalisasi. Lokalisasi yang dahulu menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi informal menyebabkan terbentuknya jaringan masyarakat yang heterogen dengan banyak pendatang. Namun setelah ditutup, kawasan menjadi lebih sepi dan homogen, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat menurun drastis. Dampak yang paling nyata adalah penurunan pendapatan pedagang, pemilik usaha kecil, dan penyedia jasa yang kehilangan pelanggan, sehingga sebagian masyarakat mengalami tekanan ekonomi. Walaupun terdapat upaya pemerintah melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal, implementasi program tersebut

belum sepenuhnya merata dan belum mampu menggantikan sumber pendapatan sebelumnya.

Penutupan lokalisasi juga menimbulkan dampak terhadap ketenteraman dan ketertiban sosial. Sebagian masyarakat memandang lingkungan menjadi lebih tenang karena tidak ada lagi kebisingan dan aktivitas malam yang mengganggu. Namun dalam perkembangannya, muncul persepsi negatif berupa rasa takut dan ketidaknyamanan karena kawasan bekas lokalisasi menjadi gelap, kumuh, dan banyak bangunan kosong yang tidak terawat. Lebih jauh, praktik prostitusi tidak sepenuhnya hilang, melainkan berubah bentuk menjadi prostitusi terselubung yang menyebar ke wilayah lain seperti pantai, jalanan, maupun kos-kosan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena prostitusi berkembang secara adaptif sehingga kebijakan penutupan tidak sepenuhnya menyelesaikan akar masalah sosial.

Sementara itu, dari dampak politik penutupan Lokalisasi Wanda memperlihatkan adanya dinamika kebijakan daerah yang dipengaruhi oleh tuntutan moral masyarakat, khususnya dorongan tokoh agama, serta peran pemerintah dalam membangun legitimasi kebijakan. Kebijakan ini menghasilkan respons politik yang beragam. Sebagian masyarakat mendukung karena sesuai dengan norma agama dan dianggap memperbaiki citra lingkungan, namun sebagian lainnya merasa kebijakan merugikan secara ekonomi dan tidak diiringi solusi yang memadai. Hal ini memunculkan persepsi bahwa pemerintah lebih berorientasi pada penertiban simbolik daripada penyelesaian dampak jangka panjang, sehingga kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah menjadi terbagi dan cenderung melemah pada kelompok terdampak ekonomi.

Dengan demikian, kebijakan penutupan Lokalisasi Wanda di Desa Munjungagung menimbulkan dampak sosial dan politik yang bersifat multidimensional. Penutupan membawa perubahan positif berupa penguatan norma sosial dan berkurangnya gangguan sosial secara terbuka, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa kemerosotan ekonomi masyarakat sekitar, perubahan rasa aman, serta munculnya prostitusi terselubung yang lebih sulit dikendalikan. Secara politik, kebijakan ini memperkuat citra pemerintah dalam aspek moralitas, namun belum sepenuhnya memperkuat legitimasi sosial karena adanya kritik masyarakat terkait partisipasi, transparansi, serta tanggung jawab pemerintah dalam pemulihan pasca penutupan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

4.2.1 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan akses informan utama khususnya eks Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari yang sebagian besar sudah dipulangkan atau berpindah tempat, sehingga peneliti kesulitan memperoleh data mendalam dari pihak yang terdampak langsung.
2. Sensitivitas topik penelitian, karena prostitusi merupakan isu sosial yang dianggap tabu. Hal ini membuat beberapa informan memberikan

jawaban yang terbatas, tertutup, atau berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

3. Data Kuantitatif pendukung yang minim, terutama data resmi terkait tingkat pendapatan warga sebelum dan sesudah penutupan, sehingga analisis dampak ekonomi lebih dominan bersifat deskriptif berdasarkan wawancara dan observasi lapangan.
4. Potensi subjektivitas informan, karena sebagian masyarakat menyampaikan pandangan berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini menyebabkan perbedaan perspektif antara warga yang diuntungkan secara moral dan warga yang dirugikan secara ekonomi.

4.2.2 Saran Praktis Untuk Stakeholder Terkait

1. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Disarankan untuk memperkuat monitoring pasca pelatihan dan bantuan modal, agar program pemberdayaan tidak hanya bersifat formalitas. Perlu dilakukan pendampingan berkala untuk memastikan masyarakat mampu mempertahankan usaha baru yang dijalankan. Selain itu, Dinas Sosial perlu membangun strategi reintegrasi sosial yang lebih kuat bagi kelompok terdampak seperti mantan PSK dan pekerja informal agar mereka tidak kembali pada aktivitas prostitusi secara terselubung.

2. Bagi Satpol PP dan Aparat Keamanan

Satpol PP bersama Polri dan TNI perlu meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahap awal penutupan. Hal ini penting untuk mencegah munculnya kembali praktik prostitusi liar di kawasan bekas lokalisasi maupun di lokasi lain seperti pantai dan kos-kosan. Selain pengawasan, perlu juga dilakukan pendekatan persuasif berbasis edukasi sosial agar penertiban tidak hanya bersifat represif.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan solidaritas sosial serta membangun kemandirian ekonomi melalui usaha produktif. Selain itu, masyarakat perlu memperkuat partisipasi dalam forum musyawarah desa agar aspirasi warga terdampak dapat tersampaikan kepada pemerintah.